

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UPAH ATAS PRAKTIK JASA
PEMERIKSAAN BARANG ELEKTRONIK TANPA AKAD DI AWAL
(Studi Kasus Di Toko Elektronik Rava Komputer Simpur Center Bandar
Lampung)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah
Oleh:**

Wiken Widya Ningrum

NPM : 1421030148

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UPAH ATAS PRAKTIK JASA
PEMERIKSAAN BARANG ELEKTRONIK TANPA AKAD DI AWAL
(Studi Kasus Di Toko Elektronik Rava Komputer Simpur Center Bandar
Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat –syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari’ah dan Hukum**



**Oleh
Wiken Widya Ningrum
NPM.1421030148**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah)

Pembimbing I: Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

Pembimbing II: Khoiruddin, M.S.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

1441 /2019 M

ABSTRAK

Salah satu kegiatan *mu'amalah* adalah upah-mengupah (*ijarah*) yang merupakan suatu bentuk adanya interaksi sesama manusia, sebagai salah satu usaha diantaranya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. *Ijarah* yang tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat adalah *Ijarah* yang berakibat tidak sahnya transaksi tersebut. Permasalahan ini mengakibatkan salah satu pihak mengalami kerugian atas tindakan ini. Seperti yang terjadi dalam pelaksanaan sistem upah-mengupah atas jasa pemeriksaan barang elektronik yang terjadi pada Toko Rava Computer Simpur Center Bandar Lampung, dengan melakukan transaksi servis barang elektronik seperti laptop atau barang elektronik lainnya dengan mematok harga upah atas jasa teknisi yang tergantung pengecekan berat atau tidaknya dengan kisaran harga Rp.25.000-50.000 yang telah melakukan pemeriksaan pra-servis yang akan berlanjut sampai selesai servis maupun dibatakannya transaksi tersebut dengan diharuskan membayar jasa upah dari pemeriksaan barang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik upah-mengupah tanpa akad di awal pada toko Rava Computer Simpur Center Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah-mengupah tanpa akad di awal pada toko tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik upah mengupah tanpa akad di awal yang dilakukan pihak toko tersebut dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang sistem upah-mengupah tanpa akad di awal yang terjadi pada toko tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian adalah deskriptif analitis, sumber datanya adalah data lapangan, sampelnya adalah para customer dan pihak karyawan di toko Rava Computer yang dijadikan responden. Sedangkan teknik pengumpulan data melalui wawancara (*interview*). Metode berfikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir Induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik upah-mengupah tanpa akad di awal tersebut adalah haram dan dilarang dalam hukum islam, sebab menarik keuntungan yang tidak disetujui dan tidak diketahui oleh salah satu pihak bahwa adanya biaya tambahan yang diharuskan untuk dibayar. Hal ini yang membuat sebagian konsumen tidak menyetujui terhadap prosedur yang ditetapkan sebab apapun biaya yang akan dikeluarkan akan lebih baik jika kedua pihak sama-sama mengetahui dan menyetujui secara bersamaan, hal ini untuk menghindari pemaksaan terhadap konsumen dan juga mempererat tali silaturahmi antar sesama makhluk sosial di bumi ini yang mana membangun kehidupan atas dasar kejujuran, adil, dan saling tolong menolong.



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp.(0721)703278

PERSETUJUAN

**Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
UPAH ATAS PRAKTIK JASA
PEMERIKSAAN BARANG
ELEKTRONIK TANPA AKAD DI AWAL
(Studi Kasus di Toko Rava Computer
Simpur Center Bandar Lampung)**

Nama : Wiken Widya Ningrum

NPM : 1421030148

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Muamalah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden
Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

Khoiruddin, M.S.I.

NIP: 197012282000031002

NIP: 197807252009121002

Ketua Prodi Muamalah

Dr. H. A. Kurnedi Ja'far, S.Ag., M.H.

NIP: 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp(0721)703278

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Atas Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik (Studi di Toko Rava Computer Simpur Center Bandar Lampung)**. Disusun oleh **Wiken Widya Ningrum NPM 1421030148 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)** telah diujikan dalam sidang **Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**, pada **hari/tanggal: Senin, 8 Juli 2019**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H


(.....)

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I


(.....)

Penguji I : Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag. M.H


(.....)

Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag


(.....)



Dekan Fakultas Syariah

H. Nuruddin Tahmid, M.H.

NIP. 196210221993031002

MOTTO

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ

فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ^ط وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ

بِمَعْرُوفٍ^ط وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزِضْ لَهُنَّ أُخْرَى ۖ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.(QS At-Thalaq-6)¹



¹ Tim Tasbih Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: Versia Yogya Grafika, 1995), h. 58.

PERSEMBAHAN

Sembah dan sujudku kepada pemilik kehidupan dan alam semesta Allah SWT. Dan Shalawat serta salamku tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW. Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang sudah memberikan semangat dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini.

Skripsi ini kupersembahkan kepada Almarhum papaku yang telah berada di sisi Allah, untuk papa terimakasih Ku ucapkan atas segala yang diberikan sejak dini sampai dewasa hingga papa tiada sebelum melihatku memakai toga, untuk pertama kali seumur hidup memakai toga tanpa kehadiran papa. Tetapi hanya kebanggan ini serta doa yang bisa kupersembahkan untuk papa dan mama, semoga papa bahagia dan bangga melihatku memakai toga. Sekali lagi rasa terimakasihku untuk papa dan mama yang selalu berusaha apapun untukku. Tidak ada yang bisa membalas jasa yang tulus mama dan papa tetapi doaku selalu menyertai untuk papa dan mama. Dari anak kalian Wiken Widya Ningrum S.H.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Wiken Widya Ningrum, dilahirkan pada tanggal 04 Juni 1995 di Kotabumi, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, merupakan anak ke empat dari empat bersaudara, putri dari pasangan Bapak Hadi Pandowo dan Ibu Marlina. Pendidikan di mulai dari :

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 06 Kalibening Raya, Kabupaten Lampung Utara, lulus pada tahun 2007.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 01 Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, lulus pada tahun 2010.
3. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 01 Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, lulus pada tahun 2013.
4. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah di IAIN Raden Intan Lampung.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kita mendapat syafaat beliau kelak di hari kiamat.

Adapun judul skripsi ini “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Atas Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik (Studi pada Toko Elektronik Rava Computer Simpur Center Bandar Lampung)”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat menyelesaikan studi di program Strata Satu (S1) Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Khoiruddin, M.S.I selaku ketua Jurusan Muamalah.
4. Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag selaku Pembimbing I yang penuh kesabaran membimbing penulis hingga selesai .
5. Khoiruddin, M.S.I selaku Pembimbing II yang telah memberikan nasihat serta meluangkan waktunya untuk membimbing penulis hingga selesai.

6. Bapak dan Ibu Dosen dan Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama studi.
7. Kupersembahkan skripsi ini untuk Papa yang telah mendahului semoga dengan keberhasilan ini dapat membuat papa bangga dan bahagia di sisi Allah dan kemudian Mamaku Marlina yang kusayangi hanya bhaktiku untukmu serta kakakku Widya Sumantri dan Indra Yunani, Kakak Perempuan Ledy Ratih Balqis serta kakak iparku dan ayuk iparku (Evi susanti, Ratih Handayani, Dedi Saputra) Terimakasih atas dukungan dan kasih sayang kalian.
8. Terimakasihku kepada keluarga besar yang turut andil dalam proses pendidikan penulis hingga saat ini .
9. Dan untuk seseorang yang terkasih dan setia menemaniku Nanang Kurniawan terimakasih untuk segala dukungan dan kekuatan memotivasi penulis hingga selesai.
10. Sahabat perjuanganku di Muamalah Leoni Citra Unggulia, Gita Andriyani, Rian Safitri, Tri Setia, Hafifah Agustina dan rekan Muamalah C 2014 semoga kalian sukses di masa depan Aamiin.
11. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung 2019
Penulis

Wiken Widya Ningrum
1421030148

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
F. Kegunaan Penelitian.....	11
G. Metode Penelitian.....	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad Dalam Islam.....	17
1. Pengertian Akad	17
2. Dasar Hukum Akad.....	18
3. Rukun Dan Syarat Akad.....	19
4. Macam-Macam Akad.....	22
5. Sah Dan Batalnya Akad	23
6. Asas akad dalam Hukum Islam	27
B. Upah Menurut Hukum Islam	36
1. Pengertian Upah(Ijarah)	36
2. Dasar Hukum Upah(Ijarah).....	37
3. Rukun Dan Syarat Upah(Ijarah).....	40
4. Macam-Macam Upah.....	44
5. Upah yang Dilarang dalam Islam.....	45
6. Hak Menerima Upah	48
7. Sistem Ijarah dalam Islam	49

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
1. Visi dan Misi Toko Rava Computer	54
2. Struktur Organisasi Toko Rava Computer	55
3. Gambaran Struktur Kepengurusan Toko	57
4. Pelayanan Toko Rava Computer.....	57
B. Pelaksanaan Upah atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik	58

BAB IV ANALISIS DATA

- A. Pengupahan Jasa Pemeriksaan Barang Rusak Elektronik
Pada Toko Rava Computer 63
- B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Jasa Pemeriksaan
Barang Elektronik 65

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 70
- B. Saran-Saran 71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Demi memudahkan skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman, maka perlu diuraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Atas Praktik Jasa Pengecekan Barang Elektronik Tanpa Kejelasan Akad (Studi Kasus Di Toko Rava Computer Simpur Center Bandar Lampung ”. Adapun Istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah meninjau, melihat sesuatu yang sangat jauh dari tempat yang tinggi; melihat-lihat (menengok; memeriksa; mengamati dan sebagainya).¹
2. Hukum Islam menurut ulama Ushul Fiqh adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunah Rasulullah tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi yang beragama islam.²
3. Barang Elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika serta hal atau benda yang menggunakan alat tersebut dan antara lain dapat digunakan pada elektronik konsumen yaitu alat elektronik pribadi yang

¹Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amelia, 2005), hlm. 336.

² Amir Syarifuddin, , *Ushul Fiqh*, Cet.I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5.

digunakan dalam sehari-hari, dan media elektronik yaitu sarana media masa yang mempergunakan alat elektronik modern misalnya radio, televisi.³

4. Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, sedangkan menurut Benham ialah upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang member pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.⁴
5. Akad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Akad dalam terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatan, pengokohan, dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. menurut ulama fiqh akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjabar dari dua keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian.⁵

Berdasarkan uraian dari beberapa istilah di atas, bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah mengamati bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upah atas jasa pemeriksaan barang rusak elektronik tanpa adanya kejelasan akad di awal perjanjian.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul mengenai upah dari praktik jasa pengecekan barang elektronik dalam Perspektif Hukum Islam adalah sebagai berikut

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Elektronik>

⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 361.

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010), h. 15.

1. Alasan Objektif

Di dalam Islam konsep upah sendiri ialah pendapatan atas jasa yang diberikan dari seseorang atas unsur kerelaan dan kesepakatan dari kedua pihak sebelum melakukan pekerjaan. Jasa yang sesuai porsi yang dilakukan oleh pelaku usaha ialah harus sesuai dengan pengambilan manfaat yang setara atas pekerjaan dilakukan. Sedangkan di dalam Hukum Perjanjian Islam dirasakan penting oleh masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam mengingat sistem hukum perjanjian Islam akan melahirkan transaksi-transaksi bisnis yang terbebas dari unsur-unsur yang dilarang berupa perjudian (*Masyir*), ketidakjelasan (*gharar*), suap-menyuap (*ryswah*), bunga (*riba*), dan *bathil*.

2. Alasan Subjektif

Judul dari skripsi ini menarik untuk diteliti lebih lanjut, dalam hal ini memperkaya pengetahuan dalam bidang *mu'amlah* khususnya tentang *ijarah* agar lebih mendalam

C. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan aturan dan norma yang mengatur perilaku manusia biasa, secara terminologi umum, hukum adalah himpunan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Sedangkan dalam istilah Islam hukum merupakan titah Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang sudah mukallaf dalam hal tuntutan melakukan sesuatu atau meninggalkannya (seperti wajib, sunnah, haram dan makruh) atau kebebasan

perbuatan (mubah) atau dalam pernyataan sah dan tidaknya suatu perbuatan sehingga tercapai keadilan. Disamping itu hukum juga bertujuan melindungi pihak yang lemah dari yang kuat seperti dizaman saat ini.

Setiap masyarakat secara tidak langsung mendapat peran sebagai konsumen, karena manusia sebagai makhluk yang selalu ingin memenuhi segala kebutuhannya dengan mengkonsumsi barang atau jasa,. Selain sebagai makhluk sosial, pada dasarnya manusia sebagai makhluk biologis yang tidak pernah berhenti memiliki kebutuhannya untuk mempertahankan hidup. Untuk memuaskan kehidupannya. Pada prinsipnya kebutuhan manusia terbagi dalam tiga hal yakni:

1. Kebutuhan primer yaitu kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi segala kebutuhan yang harus dipenuhi, misalnya sandang, pangan , papan.
2. Kebutuhan skunder yaitu kebutuhan tambah yang intinya hanya menambah kepuasan konsumen.
3. Kebutuhan akan kemewahan (tersier) yaitu kebutuhan yang hanya sebagai orang saja yang dapat memenuhi, misalnya perhiasan, mobil, tv, radio dan lainnya.⁶

Untuk memenuhi kebutuhannya, ada sebagian masyarakat yang mengonsumsi kebutuhannya dengan cara produksi sendiri. Namun pada umumnya banyak pula masyarakat yang dalam memenuhi kebutuhannya dengan tidak memproduksi sendiri atau selalu melibatkan pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya misalnya dengan cara menyewa /jual jasa. Sebagai

⁶Abdul Manan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta:Dana Bhakti Wakaf, 1997), h. 48.

contoh bahwa sebagian masyarakat mengkonsumsi jasa sebagai prantara untuk membantu kebutuhannya yang dilakukan oleh sebagian masyarakat.

Dalam islam membolehkan manfaat dari sesuatu yang diharamkan menurut syara. Hal ini ditegaskan Allah SWT dalam QS Al-Baqarah:168 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.⁷

Islam mengajarkan kepada umatnya agar mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan berusaha sebaik-baiknya, tetapi perlu diingat usaha yang dianjurkan adalah yang sesuai dengan aturan agama Islam. Oleh karena itu apabila pekerjaan yang dilakukan bertentangan dengan aturan agama Islam bagaimana dengan upah yang diterima karena telah mengerjakan pekerjaan yang telah dilarang dalam islam.

Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan untuk membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa member mudharat kepada orang lain. Dalam hal muamalat banyak sarana yang dapat digunakan untuk mencapai kemaslahatan dirinya maupun

⁷Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahannya "AL-Aliyy"*, (Bandung: Diponogoro, 2000), h. 41.

orang lain, salah satunya sarana yang digunakan adalah melalui jasa atau biasa yang disebut dengan *Ijarah* atau upah mengupah.

Ijarah yang berarti juga perjanjian kerja, ada kalanya merupakan perjanjian dengan orang-orang atau lembaga tertentu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan khusus bagi seseorang atau beberapa orang *musta'jir*.⁸ Banyak hadis Nabi yang memberikan keterangan bahwa Nabi dan para sahabatnya melakukan perjanjian upah mengupah, yang berarti upah mengupah merupakan perjanjian atau perbuatan yang dibenarkan oleh hukum Islam selama itu perjanjian yang bukan terlarang. *Ijarah* tentunya tidak akan pernah terlepas dari kehidupan manusia terutama masyarakat yang berada di kota-kota besar yang telah maju.

Pada era modern saat ini banyak pekerjaan-pekerjaan yang bertentangan tetapi tetap saja dilakukan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya dengan mengambil keuntungan dengan cara mematok harga dan tidak adanya kesepakatan di awal perjanjian, seperti yang terjadi di toko servis komputer/laptop Rava Komputer di Simpur Center, di toko Rava Komputer ini melayani jasa servis dan jual beli laptop dan alat elektronik untuk perangkat laptop dan komputer.

Dengan melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk mengetahui dimana letak rusak dari barang elektronik tersebut harus membayar upah sebesar Rp 25.000-50.000 jika kontrak perjanjian batal dikarenakan harga yang diterima untuk pengecekan total sangat tinggi. Akibatnya, customer

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Edisi Pertama, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), h. 131.

membatalkan akad tersebut karna selaku *mu'jir* mempunyai hak khiyar untuk menjauhi unsur ketidakjelasan dalam kontrak, hal ini yang membuat customer (*mu'jir*) menyebabkan kerugian dikarenakan dalam konsep segi harga atau upah yang mana harus ditentukan pada saat melakukan akad diawal kontrak agar kedua-duanya tidak merasa adanya unsur ketidakadilan dan pemaksaan harga.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah terkadang pelaku usaha sering memberikan penjelasan upah atas jasanya pada saat di akhir perjanjian dengan mematok harga kepada customer sehingga menyebabkan unsur pemaksaan, kekeliruan. Hal ini mengacu pada riba dikarenakan konsep akad yang tidak jelas, seperti yang dijelaskan pada hadis nabi berikut ini

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأَخْدَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَلْجَرَ اجِيرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أَجْرَهُ. رَوَاهُ
 عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَّاهُ أَبِي حَقٍّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي
 حَنِيفَةَ.⁹

Artinya: Dari abu Sa'id Alkhudriyyi r.a bahwasannya Rasulullah s.a.w bersabda: "Barangsiapa yang mengupah seorang buruh hendaklah ia terangkan upahnya "kepadanya". Diriwayatkan oleh Abdurazaq padanya ada inqitha, tetapi Baihaqy menganggapnya mausul dari jalan Abu Hanifah.

Sedangkan dalam Islam mematok harga yang tidak sesuai dengan porsinya adalah haram yaitu tdk adanya keseimbangan pada pihak customer

⁹ Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalany, *Bulughul Maram*, (Bandung: PT. Alma' Arif, 1996), h. 337

(*mu'jir*) dan pelaku usaha (*musta'jir*) tidak bisa menuntut haknya karena tidak adanya ketentuan yang jelas dan mengikat. Begitu juga dengan setiap perjanjian yang sah mengikat bagi para pihak yang mengadakan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yang mana ini tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu perlunya ada kesepakatan para pihak (asas konsensual), kecakapan bertindak dari para pihak, adanya objek tertentu, dan mempunyai kausa halal. Dianggap tidak ada jika di dalamnya terdapat paksaan, kekhilafan, maupun penipuan,

Hal ini juga terdapat dalam pedoman umum Islam tentang masalah kerja, yaitu Islam tidak membolehkan pengikutnya untuk mencari uang sesuka hatinya dan dengan jalan apapun yang dimaksud. Tetapi Islam memberikan kepada mereka suatu garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh dalam mencari perbekalan hidup, dengan menitik beratkan juga kepada masalah kemaslahatan umum. Garis pemisah ini berdiri di atas landasan yang bersifat *kulli* (menyeluruh) yang artinya “ Bahwa semua jalan untuk berusaha mencari uang yang tidak menghasilkan manfaat kepada seseorang kecuali dengan menjatuhkan orang lain, adalah tidak dibenarkan. Dan semua jalan yang saling mendatangkan manfaat antara individu-individu dengan saling rela-memerelakan adil dan tidak adanya unsur keterpaksaan dari pihak manapun, adalah dibenarkan”.¹⁰

Dalam hukum Islam pembahasan mengenai hal-hal yang bertujuan untuk melindungi hak *mu'jir* dari dapat kita lihat dalam *maqashid syariah*(

¹⁰ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Bina Ilmu, 1993), h. 193.

tujuan-tujuan adanya hukum) sehingga memperlihatkan hal tersebut, segala macam persoalan bisa terselsaikan. Lebih mengenai kebutuhan-kebutuhan manusia baik yang bersifat dharuriyat, hajiyyat maupun tahsinihiyyat. Selain itu juga dalam islam terdapat *khiyar*, yaitu hak memilih untuk melangsungkan jual beli disebabkan suatu hal bagi kedua pihak. Misalnya tidak terpenuhinya syarat yang telah disetujui, orang itu belum dilihat secara jelas oleh pembeli, sifat yang disetujui tidak terpenuhi dan adanya cacat dalam barang atau harga yang diserahkan .

Oleh sebab itu pemberlakuan upah sendiri sebagai sarana penukaran yang dilakukan oleh penjual dan pembeli jasa harus terpenuhi syarat dan ketentuannya sesuai dengan porsi yang dikerjakan, seperti yang dijelaskan dengan ayat Al-Qur'an dibawah ini :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. ¹¹

¹¹ *Ibid.*, h. 122.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua transaksi yang bermaksud mengeksploitasi adalah dilarang, juga transaksi yang bermaksud mengambil keuntungan berlebihan terhadap pihak lain. “janganlah bunuh dirimu” adalah peringatan keras bahwa seseorang yang dengan cara curang mengambil harta orang lain, sesungguhnya telah membawa dirinya sendiri kepada kehancuran, karena kejahatan semacam itu benar-benar menghancurkan aturan masyarakat yang pada akhirnya akan mengancam dirinya sendiri dan ia tidak dapat melepaskan diri dari akibat kejahatannya sendiri tersebut.¹²

Seperti halnya dengan mengambil harta dengan cara yang batil atau laba dari pekerjaan tersebut hukumnya adalah haram dan riba jika dalam salah satu pihak memfasakh akad dikarenakan terdapat khiyar dalam transaksi yang dilakukan maka tidak wajib bagi konsumen untuk memberikan upah sedangkan pekerjaan tersebut belum sempat dilakukan sebagai teknisi dari service computer. Karna suatu transaksi apapun itu dinyatakan haram atau cacat apabila disertai kondisi yang menguntungkan salah satu pihak, atau menimbulkan ketidakpuasan dalam kontrak tersebut atau memberi peluang untuk menarik keuntungan banyak dari tujuan transaksi tersebut.¹³

Bahkan dalam hukum bisnis syariah mengenai cara-cara haram dalam mengeruk keuntungan diantaranya ialah keuntungan dari memperdagangkan komoditi haram, keuntungan dari perdagangan curang dan manipulasi,

¹²Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* jilid IV, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 2003), h. 187.

¹³*Ibid.*, h. 189.

keuntungan melalui penyamaran harga yang tidak wajar, dan keuntungan melalui penimbunan barang dagangan.¹⁴

Berangkat dari kondisi inilah penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih dalam tentang upah jasa pemeriksaan barang rusak elektronik yang ditinjau dari pandangan hukum Islam dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik (Studi Kasus di Toko Rava Computer Simpung Center Bandar Lampung)

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik upah jasa pemeriksaan barang elektronik di Toko Rava Computer Simpung Center?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik upah jasa pemeriksaan barang elektronik di Toko Rava Computer?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan jasa pemeriksaan barang rusak elektronik di Toko Rava Computer Simpung Center
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang status upah pada jasa pemeriksaan barang elektronik tanpa kejelasan akad di awal perjanjian.

2. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan dan media pembandingan dalam khasanah keilmuan di bidang Muamalah, serta untuk

¹⁴ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah, Cet II* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 117.

memberikan informasi tentang bagaimana status upah jasa pemeriksaan barang rusak elektronik menurut Tinjauan Hukum Islam.

2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana dalam mempraktekan ilmu-ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama belajar di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan yang mampu mengadakan penelitian mendapatkan data yang valid dan otentik. Beranjak dari hal tersebut diatas, maka penulis perlu menentukan cara atau metode yang dianggap penulis baik untuk digunakan dalam penelitian ini, sehingga nantinya permasalahan yang dihadapi akan mampu terselsaikan secara baik dan optimal. Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis Penelitian yaitu Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.¹⁵

Selain penelitian lapangan, juga didukung dengan penelitian pustaka yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan material, misalnya : buku, catatan, koran, dokumen, jurnal, artikel dan referensi lainnya.

- b. Sifat Penelitian

¹⁵ Kartini Kartono, *Pengantar metodologi Riset Sosia*, Cetakan VII (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 81.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yaitu suatu dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan.¹⁶

2. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan metode penelitian lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian ini diperoleh dari responden langsung yakni dari Karyawan servis dan konsumen di Toko Rava Simpur Center.

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung data penelitian, pengumpulan data ini diperoleh dari buku-buku, majalah, jurnal, dan judul-judul lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁷ Menurut Nana Sudjana populasi adalah sumber data yang artinya sifat atau karakteristik dari sekelompok subyek, gejala

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 23.

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2001), h. 57.

atau obyek.¹⁸ Adapun data yang dijadikan sebagai populasi ialah terdapat 2 orang dari pihak toko Rava komputer yaitu pemilik dan teknisi serta 6 orang konsumen sebagai data yang dijadikan populasi.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dengan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi.¹⁹ Ditemukan sampel pada penelitian ini yaitu 7 orang. Terdiri dari 2 orang dari pihak toko dan 5 orang konsumen Toko Rava Komputer di Simpur Center Bandar Lampung.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi, diperlukan untuk melakukan pengamatan secara langsung tentang latar belakang keadaan saat ini dan interaksi lingkungan suatu kelompok social, individu. Adapun objek penelitian adalah Toko Rava Simpur Center Bandar Lampung.

b. Metode Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian lapangan.²⁰ Yang menjadi responden nya yaitu karyawan dan *Customer*.

¹⁸ Nana Sudjana, *Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 23.

¹⁹ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung,: Seksi Penerbit Fakultas Syariah, 2014), h. 81.

²⁰ AbdulKadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 86.

4. Pengolahan Data

Umumnya Dilakukan dengan Cara setelah data yang diperlukan terkumpul baik dari perpustakaan maupun lapangan, maka diolah dengan sistematis, sehingga menjadi hasil pembahasan dengan gambaran data .

- a) Pemeriksaan data (*editing*) bertujuan untuk mengurangi kesalahan yang ada didalam daftar pertanyaan dan jawaban yang diperoleh dari pemilik Toko Rava Computer Simpur center, pegawai atau karyawan teknis dari
- b) Pemaknaan data memberikan penjelasan secara rinci dan mendalam mengenai data yang disajikan agar mudah dipahami .
- c) Rekontruksi Ulang data yaitu menyusun ulang data secara teratur, beraturan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d) Sistematika data yaitu menepatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²¹

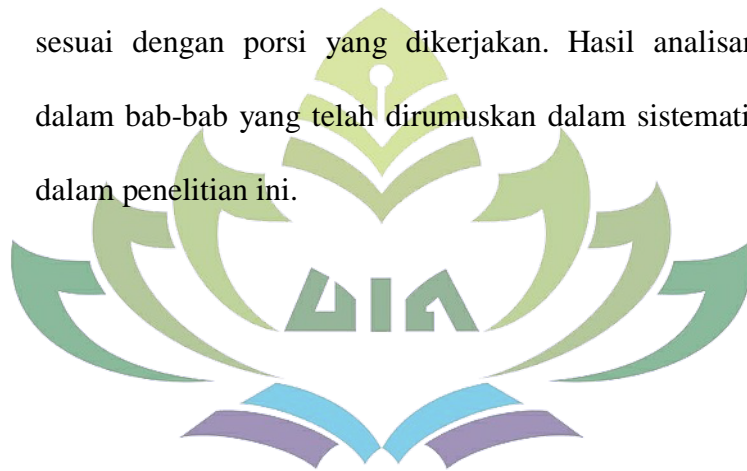
5. Analisia Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Perspektif Hukum Islam tentang system pengupahan tanpa kejelasan akad yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif . maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui bentuk upah mengupah serta praktek upah mengupah ini. Tujuannya dapat dilihat dari Pandangan Hukum Islam .

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, h. 126.

Metode berfikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir Induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.²²

Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan system Pengupahan Tanpa Kejelasan Akad dalam Hukum Islam dengan mematok harga tanpa sesuai dengan porsi yang dikerjakan. Hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.



²² Sutrisno Hadi, *Metode Research* , Jilid I (Yogyakarta : Yayasan Penerbit , Fakultas Psikologi UGM, 1981), h. 36.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Dalam Islam

1. Pengertian Akad

Akad menurut etimologi (bahasa) mempunyai beberapa arti antara lain:

a. Mengikat

Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatnya salah satunya dengan yang lainnya sehingga bersambungan, kemudian keduanya menjadi sebagai potongan benda .

b. Janji.

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Ali Imran (3): 76:



Artinya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.¹

c. Istilah akad berasal dari bahasa arab yakni *Al-‘aqd*, secara bahasa *Al-‘aqd* bentuk masdarnya *‘Aqada* dan jamaknya adalah *Al-‘Uqud* yang berarti adalah perjanjian tercatat atau kontrak.²

¹ *Ibid.*,h.88

²(Al-adalah Vol. XII. No.04 4 Desember 2015), h.786. (On-line) tersedia di : <http://ejournal.radenintan.ac.id/mdec/php/adalah/article.view>. (29 Desember 2018, pukul 22:10 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Istilah *Ahdu* dalam Al-Qu'an mengacu kepada pertanyaan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut.³

Perkataan '*aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu apabila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama maka terjadilah perikatan dua buah janji ('*ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebutkan perikatan ('*aqad*).

Ijab adalah Pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginannya secara pasti untuk mengikat diri. Sedangkan *qabul* pernyataan pihak lain setelah *ijab* yang menunjukkan persetujuan untuk mengikat diri. Jadi setiap pernyataan diungkapkan oleh pihak lain setelah *ijab* disebut *qabil* (*Pelaku qabul*), tanpa membedakan antara pihak mana yang memulai pernyataan pertama itu.⁴

2. Dasar Hukum Akad

a. Q.S al-Maidah 5:1

Eka Nuraini Rahmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani,"Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia", *Jurnal Al-'Adalah*, Vol.XII, No. 04, 4 Desember, 2015), h.786.

³ Tim Tasbih Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: Versia Yogya Grafika, 1995), h. 23.

⁴ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, (Jakarta : Gaya Media Pertama, 2007), h. 98.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ....

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu."⁵

b. Q.S. Ali 'Imran(3):76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: "(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa."⁶

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Rukun akad adalah kata *mufrad* dari kata jama' "arkaa" artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sah (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk dalam pekerjaan itu.⁷

Adapun Ulama Hanafiyah mengartikan rukun dengan sesuatu yang tergantung atasnya sesuatu yang lain dan ia berada dalam esensi sesuatu tersebut, sedangkan menurut Jumhur Ulama Fiqh, rukun adalah sesuatu yang lain atasnya, tetapi tidak harus berada pada esensi sesuatu tersebut.⁸

Dengan demikian yang dimaksud dengan rukun adalah suatu unsur penting yang menyebabkan adanya suatu pekerjaan atas

⁵ *Ibid.*, h. 156

⁶ *Ibid.*, h. 165

⁷ M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, Cetakan Ke III, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), h.300.

⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta : Logos Publishing House, 1996), h. 264.

pekerjaan yang lain, yang dalam hal ini adalah pekerjaan jual beli, upah mengupah atau perdagangan.

Menurut ahli-ahli Hukum Islam Kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat,⁹ yaitu:

- 1) Para pihak yang membuat akad (*al-aqidan*)
- 2) Pernyataan Kehendak para pihak (*sighatul- 'aqd*)
- 3) Objek Akad (*mahalul- 'aqd*)
- 4) Tujuan Akad (*maudhu' al- 'aqd*)

b. Syarat Akad

Berdasarkan unsur akad yang telah dibahas, ada beberapa macam syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah, syarat memberikan, dan syarat keharusan (*luzum*).

1. Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang diisyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi menjadi dua bagian:

- a. Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.
- b. Khusus, yakni syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak diisyaratkan pada bagian lainnya.

2. Syarat sahnya akad

⁹ Abdul Mujueb, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2001) , h . 25.

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang diisyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak.

Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemadharatan, dan syarat-syarat jual beli rusak(*fasid*).

3. Syarat pelaksanaan akad

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara', adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-*thasaruf* sesuai dengan ketetapan syara', baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang). Dalam hal ini diisyaratkan antara lain:

- a. Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad, jika dijadikan, maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli.
- b. Barang yang dijadikan tidak berkaita dengan kepemilikan orang lain.

4. Syarat kepastian hukum (*luzum*)

Dasar dalam akad adalah kepastian. Diantaranya syarat *luzum* dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa khiyar jual beli, seperti khiyar syarat, khiyar aib, dan lain-lain. Jika *luzum* tampak, maka akad batal atau dikembalikan.¹⁰

c. Macam-macam 'Aqad

Akad dibagi menjadi beberapa macam, yang setiap macamnya sangat bergantung pada sudut pandangnya. Di antara bagian akad yang terpenting adalah berikut ini:

1. Berdasarkan ketentuan syara'

a. Akad sah

Akad sah adalah akad yang memenuhi unsur dan syarat yang telah ditetapkan syara'. Dalam istilah ulama Hanafiyah akad sah adalah akad yang memenuhi ketentuan syariat pada asalnya dan sifatnya.

b. Akad tidak sah

Akad tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya. Dengan demikian, akad ini tidak berdampak hukum atau tidak sah. Jumhur ulama selain Hanafiyah menetapkan bahwa akad yang batil atau fasid termasuk golongan ini, sedangkan ulama hanafiyah membedakan antara fasid dan batal

2. Sifat-sifat Akad

¹⁰ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia), h. 64-66.

Segala bentuk *tasharuf* (aktivitas hukum) termasuk akad memiliki dua keadaan umum.

a. Akad tanpa syarat (*Akad Munjiz*)

Akad *munjiz* adalah akad yang diucapkan seseorang, tanpa member batasan suatu kaidah atau tanpa menetapkan suatu syarat. Akad seperti ini dihargai syara' sehingga menimbulkan dampak hukum.

b. Akad bersyarat (*Akad ghair Munjiz*)

Akad *ghair munjiz* adalah akad yang diucapkan seseorang dan dikaitkan dengan sesuatu, yakni apabila syarat atau kaitan itu tidak ada akad pun tidak jadi, baik dikaitkan dengan wujud sesuatu tersebut atau ditangguhkan pelaksanaannya.¹¹

d. Sah dan batalnya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi menjadi dua:

1. Akad *shahihah*, yaitu akad-akad yang mencukupi persyaratannya , baik syarat yang khusus maupun syarat yang umum.
2. Akad *fasihah* yaitu akad-akad yang cacat atau cedera karena kurang salah satu syarat-syaratnya baik syarat umum maupun syarat khusus, seperti nikah tanpa wali.¹²

Rukun (unsur) akad, seperti telah disinggung terdahulu, meliputi empat macam dalam doktrin hukum islam kontemporer, yaitu :

1. Para pihak yang membuat akad

¹¹ *Ibid.*, h.66-68

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* , Cet ke-9 (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h. 43.

2. Pernyataan kehendaak atau pernyataan perizinan (yang meliputi ijab dan Kabul)
3. Objek akad
4. Tujuan akad

Masing-masing rukun ini memerlukan syarat-syarat agar rukun tersebut dapat membentuk akad yang kemudian disebut syarat-syarat terbentuknya akad, yang keseluruhannya meliputi delapan macam, yaitu:

- a. Tamyiz (berakal)
- b. Berbilang pihak, kedua syarat ini merupakan syarat dari rukun pertama, yaitu para pihak yang membuat akad
- c. Persesuaian ijab dan Kabul
- d. Kesatuan majlis akad, syarat (3) dan (4) merupakan syarat dari rukun kedua, yaitu pernyataan kehendak (perizinan, persetujuan, *ar-ridha*)
- e. Dapat diserahkan
- f. Tertentu dan ditentukan
- g. Dapat diperdagangkan, dan tiga syarat terakhir ini merupakan syarat dari rukun ketiga, yaitu objek akad.
- h. Tidak bertentuan dengan syara.

Hanya saja dengan terpenuhinya keempat rukun dan kedelapan syarat diatas, akad belum serta merta menjadi sah.

Meskipun sudah terbentuk, namun harus dipenuhi beberapa kualifikasi lagi untuk sahnya akad, yaitu :

- 1) Bebas dari gharar
- 2) Bebas dari kerugian yang menyertai penyerahan
- 3) Bebas dari syarat-syarat dari fasid
- 4) Bebas dari riba untuk akad atas beban

Adanya *gharar*, adanya kerugian yang menyertai penyerahan, adanya syarat fasid dalam akad, dan adanya unsure riba, (dan menurut jumhur adanya paksaan) membuat suatu akad menjadi fasid menurut mazhab Hanafi atau batal menurut mazhab lainnya yang tidak membedakan fasid dan batal.¹³ Para pengikut Imam Malik berpegangan pada lahiriah dalil-dalil *sam'I* dan qiyas dan diantara dalil lahir yang paling jelas dalam masalah ini ialah firman Allah QS Al-Maidah 5:1 yaitu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ...^ج

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu..¹⁴

Yang dimaksud dengan akad ialah *ijab* dan *qabul* dan perintah tersebut menunjukan wajib, sedangkan khiyar majlis mengharuskan ditinggalkannya pemenuhan akad. Karena menurut fuqaha pembeli dan penjual dibolehkan menarik kembali dalam

¹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers , 2010), h. 243.

¹⁴ *Ibid.*, h. 156.

jual beli sesudah menelitinya, dan selama kedua belah pihak belum berpisah dari majlis.¹⁵

Sedangkan akad yang sah ada kemungkinannya tidak dapat dilaksanakan akibat hukumnya beberapa syarat berlakunya akibat hukum akad, yaitu adanya kewenangan atas objek akad (asset yang menjadi objek), dan adanya kesewenangan terhadap tindakan hukum yang dilakukan. Akan tetapi, meskipun syarat ini juga telah terpenuhi masih ada dalam akad itu kemungkinan hak salah satu pihak untuk membatalkan akad secara sepihak karena sifat akad itu sendiri atau karena adanya beberapa jenis *khiyar* (hak opsi) .

Suatu akad menjadi sah apabila rukun-rukun dan syarat-syarat tersebut terpenuhi, dan tidak sah apabila rukun dan syarat yang dimaksud tidak dipenuhi. Akan tetapi, oleh karena syarat-syarat akad itu beragam jenisnya, maka kebatalan dan keabsahan akad menjadi bertingkat-tingkat sesuai dengan sejauh mana rukun dan syarat-syarat itu terpenuhi.¹⁶

Menurut Rahmat Syafe'I, akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad *mauquf* (ditangguhkan), akad dengan pembatalan, terkadang dihilangkan dari asalnya seperti pada masa khiyar, terkadang dikaitkan pada masa yang akan datang, seperti pembatalan dalam sewa-menyewa dan pinjam-meminjam yang telah disepakati, pada

¹⁵ Ibnu Rusyd , *Terjemahan Bidayatul Mujtahid* , (Semarang : Asy-Syifa, 1990), h. 97.

¹⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 244.

akad *ghair lazim* yang kedua pihak dapat membatalkan akad, pembatalan ini sangat jelas seperti pada penitipan barang, perwakilan, dan lain-lain seperti gadai.¹⁷

Orang yang menerima gadai dibolehkan membatalkan akad walaupun tanpa sepengetahuan orang yang menggadaikan barang, adapun pembatalan pada akad lazim, terdapat dalam beberapa hal berikut:

1. Ketika akad rusak
2. Adanya khiyar
3. Pembatalan akad
4. Tidak mungkin melaksanakan akad
5. Masa akad berakhir

B. Asas-Asas Akad dalam Hukum Islam

Hukum Perdata Islam telah menetapkan beberapa asas akad yang berpengaruh pada pelaksanaan akad oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jika asas-asas ini tidak terpenuhi dalam melaksanakan akad, maka akan berakibat batal atau tidak sahnya perjanjian yang dibuat.¹⁸ Asas-asas tersebut diantaranya adalah:

1) Asas *Ibahah* (*Mabda' al-Ibahah*)

Asas *Ibahah* adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalah. Asas ini dirumuskan dalam kaidah fiqh yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

¹⁷*Ibid.*, h.70 .

¹⁸ *Ibid.*, h. 75.

Artinya: “*Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya*”.

Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian, maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.¹⁹

2) Asas kebebasan berakad (*Mabda' Hurriyyah at-Ta'aqud*)

Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objeknya maupun syarat-syaratnya, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi di kemudian hari. Kebebasan menentukan syarat-syarat ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum Islam.

Tujuan dari asas ini adalah untuk menjaga agar tidak terjadi saling mendzalimi antara sesama manusia melalui perjanjian yang dibuatnya. Asas ini dimaksudkan juga untuk menghindari semua bentuk pemaksaan (*ikrah*), tekanan, penipuan, dari pihak manapun.²⁰ Asas kebebasan berakad ini merupakan konkretisasi lebih jauh dan spesifikasi yang lebih tegas terhadap asas *ibahah* dalam muamalah.²¹

3) Asas konsensualisme (*Mabda' ar-Radha' iyyah*)

¹⁹ *Ibid.*, h. 83-84.

²⁰ *Ibid.*, h. 79

²¹ Syamsul Anwar, *Op Cit*, h. 84.

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.²²

Para ahli hukum Islam biasanya menyimpulkan asas konsensualisme dari dalil-dalil hukum berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa : 29)”²³

Sabda Nabi SAW “Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan kata sepakat”. (HR Ibnu Hibban dan Ibnu Majah).

Kaidah Hukum Islam “Pada dasarnya perjanjian (akad) itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji”.²⁴

4) Asas kerelaan (*al-Ridha*)

²² Syamsul Anwar, *Op Cit*, h. 87.

²³ *Ibid.*, h. 122.

²⁴ Mushthafa Ahmad az-Zarqa', *al-Fiqh al-Islami fi Tsaubihi al-Jadid: al-Madkhal al-Fiqhi al-'Amm*, jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), h. 1083.

Asas ini menyatakan bahwa semua akad yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan pada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Hukum Islam mempunyai pandangan yang berbeda dengan hukum perdata umum dalam hal kerelaan membuat kontrak. Dalam hukum perdata umum, kontrak dianggap sah apabila dibuat atas dasar sukarela, meskipun tidak memperhatikan nilai-nilai agama.

Adapun dalam hukum Islam nilai-nilai agama sangat diperhatikan. Oleh karena itu, kemerdekaan seseorang membuat kontrak tidak boleh menyimpang dari ketentuan agama Islam, meskipun orang yang membuat kontrak itu telah menyatakan kerelaannya. Dengan kata lain, hukum Islam pada dasarnya memberi kebebasan orang yang membuat kontrak sesuai dengan keinginannya, tapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama, untuk menjaga jangan sampai terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui kontrak yang dibuatnya.

5) Asas keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah*)

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko.²⁵

Asas keseimbangan dalam memikul risiko tercermi dalam larangan terhadap transaksi riba, di mana dalam konsep riba hanya debitur yang

²⁵ Syamsul Anwar, *Op Cit*, h. 90.

memikul segala risiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama sekali dan harus mendapat persentase tertentu sekalipun saat dananya mengalami kembalian negatif.²⁶

6) Asas persamaan dan kesetaraan (*al-Musawah*)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan akad perjanjian karena erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan prestasi dalam akad yang dibuatnya.

7) Asas keadilan (*al-'Adalah*)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu akad perjanjian dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling mendzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam akad tersebut.²⁷

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat *Hud* (11) ayat 84 yang berbunyi:

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۖ قَالَ يَبْنَؤُمْ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنِّي أَرَبُّكُمْ بَحِيرٌ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ

²⁷ Abdul Manan, *Op Cit*, h. 77.

Artinya: *“Dan kepada (penduduk) Mad-yan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya aku melihat kamu dalam Keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)”.²⁸*

Setiap kontrak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan maka prinsip keadilan sangat menentukan berlangsungnya kontrak tersebut, sebab keadilan itu merupakan hal yang bersifat multidimensional yang berintikan kebenaran.²⁹

8) Asas kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*musyaqqah*). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.³⁰

9) Asas amanah

Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Penyembunyian informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi

²⁸ *Ibid.*, h. 340.

²⁹ *Ibid.*, h. 79.

alasan pembatalan akad bila dikemudian hari ternyata informasi itu tidak benar yang telah mendorong pihak lain untuk menutup perjanjian.³¹

10) Asas tertulis (*al-Kitabah*)

Asas lain dalam melakukan akad adalah keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Ketentuan ini didasarkan kepada Al-Qur'an surat *al-Baqarah* (2) ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ...

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya..)".³²

11) Asas ilahiah

Asas ilahiah diperlukan karena setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak luput dari ketentuan Allah SWT sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an surat *al-Hadid* (57) ayat 4 yang artinya: "Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu

³¹ Syamsul Anwar., *Op Cit*, h. 91.

³² *Ibid.*, h. 70.

kerjakan". Kegiatan muamalah termasuk dalam perbuatan perikatan yang tidak lepas dari nilai-nilai ketauhidan, sehingga manusia dalam setiap perbuatannya memiliki tanggung jawab terhadap apa yang diperbuatnya. Dengan hal tersebut manusia tidak dibenarkan berbuat sekehendak hatinya, karena segala perbuatan akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.³³

Menurut KHES Bab II Pasal 21, bahwa akad dilakukan berdasarkan 11 asas, yaitu:

- a. *Ikhtiyari/sukarela*; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. *Amanah/menepati janji*; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
- c. *Ikhtiyati/kehati-hatian* setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. *Luzum/tidak berubah*; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- e. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.

³³ Gemala Dewi *et al*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Diterbitkan atas kerja sama dengan Badan Penelitian Fakultas Hukum UI dengan Prenada Media, 2005), h. 30.

- f. *Taswiyah*/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. Transparan, setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka.
- h. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. *Taisir*/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- j. itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k. sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

Kemudian Pasal 26 KHES menentukan bahwa akad tidak sah apabila bertentangan dengan:

- 1) Syariat Islam
- 2) Peraturan Perundang-undangan
- 3) Ketertiban umum, dan/atau
- 4) Kesusilaan

C. Upah Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Upah (Ujrah)

Upah dalam bahasa Arab disebut al-ujrah dari segi bahasa al-ajru yang berarti *iwad* (ganti) kata “*al-ujrah*” atau “*al-ajru*” yang bahasa berarti *al-iwad* (ganti). Dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti perbuatan.³⁴

Sedangkan menurut bahasa (etimologi) upah berarti imbalan atau pengganti. Menurut istilah (terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan member ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.³⁵

Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan member ganti dengan syarat-syarat tertentu. Berdasarkan definisi-definisi diatas, kiranya dapat dipahami bahwa ijarah adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalannya.

Menurut arti luas *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu, hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual *‘ain* dari benda itu sendiri. Sedangkan menurut ulama hanafiah mengartikan *ijarah* dengan akad yang berisi pemilikan

³⁴ Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : Rajawali Pers , 1997) , h. 29.

³⁵ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Badar Lampung:PERMATANET Publishing, 2016), h.141

manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran jumlah yang disepakati.³⁶

2. Dasar Hukum Ijarah

a. Al-Qur'an

Ulama sepakat bahwa *ijarah* diperbolehkan, ulama memperbolehkan *ijarah* berdasarkan legitimasi dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma' antara lain:

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرَّضَاعَةَ ۖ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا وَعَلَىٰ حَ
الْوُلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا
تُضَارَّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
جُنَا عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan

³⁶ Ibid.,h.29.

*jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan ”.*³⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalia diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui , maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi pekerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.³⁸

b. Hadis

Hadis adalah sabda, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat islam. Hadist dijadikan sumber hukum Islam selain Al-qur'an. Dalam hal ini kedudukan hadist merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an .

Selain itu ayat Al-Qur'an diatas ada beberapa hadist yang menegaskan tentang upah, hadist Rasulullah SAW menegaskan :

³⁷ *Ibid.*, h. 57.

³⁸ Ahmad Mustofa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi* , Cet I (Semarang: Toha Putra , 1984), h. 350.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَوْ أَحْذَرِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَلْجَرَ اجِيرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ اجْرَتَهُ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَّاهُ أَبُو بَيْحَقٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ.³⁹

Artinya: Dari abu Sa'id Alkhudriyyi r.a bahwasannya Rasulullah s.a.w bersabda: "Barangsiapa yang mengupah seorang buruh hendaklah ia terangkan upahnya "kepadanya". Diriwayatkan oleh Abdurazaq padanya ada inqitha, tetapi Baihaqy menganggapnya mausul dari jalan Abu Hanifah.

c. Ijma

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.⁴⁰

3. Syarat dan Rukun Upah (Ijarah)

A. Syarat sah upah (Ijarah)

Terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan antara rukun dan syarat sewa-menyewa menurut hukum Islam. Yang dimaksud dengan rukun sewa-menyewa adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakekat sewa-menyewa dan tidak akan terjadi sewa-menyewa tanpa terpenuhinya rukun tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat sewa-menyewa ialah sesuatu yang mesti ada dalam sewa-menyewa,

³⁹ Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalany, *Bulughul Maram*, (Bandung: PT. Alma' Arif, 1996), h. 337

⁴⁰ *Ibid.*, h.124 .

tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakekat sewa-menyewa itu sendiri.

Sebagai sebuah transaksi umum, *al-ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad *ijarah* adalah sebagai berikut.⁴¹

1) Pelaku ijarah haruslah berakal

Kedua belah pihak yang berakad, menurut ulama syafi'iyah dan hanabilah, diisyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh karena itu apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka *al-ijarah* tidak sah.

Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan ijarah mestilah orang-orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Para ulama dalam hal ini berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kewajiban. Segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang sah.

2) Keridhaan pihak yang berakad

⁴¹ Ghufuran A mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2002), h. 186.

Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini tidaklah boleh dilakukan akad *ijarah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, bik keterpaksaan itu datangny dari pihak-pihak lain. Ketentuan ini dapat dilihat dari firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁴²

Ayat diatas menjelaskan bahwa diperintahkan kepada umat islam untuk mencari rejeki yang didapat dengan jalan yang halal bukan dengan jalan yang batil, dan juga tidak dengan unsur yang merugikan antara kedua belah pihak. Akad sewa-menyewa tidak boleh dilakukan salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik dari pihak yang berakad atau pihak lain.⁴³

- 3) *Sighat* ijab Kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir* , ijab Kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab Kabul sewa-menyewa

⁴² *Ibid.*, h. 122.

⁴³ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Grafindo Persada Pertama, 2007), h. 232-233.

misalnya “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp.5.000.000”, maka *musta’jir* menjawab “ Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Ijab Kabul upah-mengupah misalnya seseorang berkata “Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp.5.000.000”, kemudian *musta’jir* menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.

- 4) *Ujrah* disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah- mengupah.
- 5) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, diisyaratkan pada yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
 - a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa menyewa)
 - c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah(boleh) menurut syara’ bukan hal yang dilarang (diharamkan).
 - d. Benda yang diisyaratkan kekal’*ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.
6. Akad (ijab kabul) dalam hal ini diisyaratkan:

- a. Akad (ijab kabul) harus dibuat sebelum pekerjaan itu dikerjakan.
- b. Akad (ijab kabul) itu tidak boleh disangkut pautkan dengan urusan lain.
- c. Akad (ijab kabul) harus terjadi atas kesepakatan bersama.

7. Waktu Pembayaran Upah

Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan.⁴⁴

B. Rukun Upah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsure-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah terbentuk karena adanya unsure-unsur yang membentuknya yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsep islam unsure-unsur yang membentuk itu disebut rukun. Menurut jumhur ulama rukun *ijarah* ada(4) empat, yaitu :

1) *Aqid* (orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan penyewa disebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.

2) *Sighat*

⁴⁴ *Ibid.*, h. 142-143.

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat akad* (*sighatul-aqad*) terdiri atas *ijab* dan *qabul* dapat melalui : 1) Ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam-diam semata . syarat-syaratnya sama dengan *ijab* dan *qabul* pada jual beli hanya saja dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

3) Upah

Yaitu sesuatu yang diberikan *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *musta'jir*

4) Manfaat

Untuk mengontrak seseorang *musta'jir* harus diketahui bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya, oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.⁴⁵

4. Macam-macam Upah (*ijarah*)

Dalam *fiqh muamalah* upah dapat diklarifikasikan menjadi dua yaitu:

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musammah*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan belah pihak yang berakad.

⁴⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam islam (fiqh muamalat)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003) , h. 231.

- b. Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.⁴⁶

5. Upah yang dilarang dalam Islam

Islam tidak mengharamkan pengupahan dalam muamalat atau dalam perdagangan jasa kecuali dijelaskan Yusuf Qardhawi bahwa “Jasa dalam ruang lingkup perdagangan yang mengandung unsure kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang, upah yang melibatkan perdagangan *khamr*, ganja, babi, patung, barang-barang sejenis, yang dikonsumsi, distribusi, atau pemanfaatannya diharamkan perdagangan juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan jasa yang didapatkan melalui praktek itu adalah haram dan kotor.”⁴⁷

Upah yang dilarang dalam islam diantaranya dijelaskan Ahmad Soleh dalam bukunya *Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II*, “jasa seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya , membeli jasa tawaran harga yang sangat tinggi dan membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat”.⁴⁸ Maksud hal tersebut yaitu :

- a. Menawarkan jasa kepada seseorang yang masih menawar penjualan jasa orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lainnya. Misalnya, tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang

⁴⁶ M.I Yusato dan MK Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* , (Jakarta : Gema Insani Press, 2002) , h. 67.

⁴⁷ Yusuf Qardhawi , *Halal Haram Dalam Islam* , (Solo : Era Intermedia, 2000), h. 24.

⁴⁸ Ahmad Sholeh , *Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II*, (Semarang : Usaha Keluarga , 1985), h. 37.

membeli dengan harga yang lebih mahal. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.

- b. Membeli dengan tawaran harga jasa yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membeli jasanya.
- c. Membeli suatu jasa sewa harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya tinggi.

Diterangkan oleh Hasbi Ash Shiddieqy menjelaskan yaitu” macam-macam upah yakni upah secara *arbun*, upah secara *najasy* menjual sesuatu yang haram adalah haram dan upah yang tidak transparan”.⁴⁹ Konsep ini dapat penulis analisa yaitu :

1) Upah secara *arbun*

Yaitu membeli barang atau jasa dengan membayar sejumlah harga jasa lebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka, kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan ke penjual.

2) Upah secara *najasy* (Propaganda Palsu)

Yaitu menaikkan harga jasa bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).

3) Menjual sesuatu yang haram

⁴⁹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam, (Tinjauan Antar Madzhab)*, (Semarang :Pustaka Riski Putra, 2001), h. 354.

Misalnya upah jasa dari babi, *khamr* , makan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam penjualan dan memperdagangkannya berarti mendukung praktek maksiat, merangsang orang untuk melakukannya, atau mempermudah orang untuk melakukannya.

4) Upah yang tidak transparan

Yaitu setiap transaksi yang memberi peluang terjadinya persengkataannya karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsure penipuan upah yang tidak sesuai yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi SAW.

Misalnya menjual calon anak binatang yang masih berada dalam tulang punggung binatang jantan , atau anak unta yang masih dalam kandungan, burung yang berada di udara, atau ikan yang masih di dalam air, dan semua upah yang masih ada unsur tidak transparan. Dan juga tujuan dari pekerjaan dari berniaga adalah memperoleh keuntungan. Selama agama membolehkan pekerjaan berniaga, namun demikian agama melarang keuntungan berlebihan yaitu keuntungan melebihi batas yang umumdi masyarakat. Oleh sebab itu agama

melarang seseorang pedagang memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga dari suatu barang atau upah atas jasa yang dilakukan.⁵⁰

Termasuk unsur yang tidak tampak adalah upah yang ghaib. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa transaksi upah tersebut adalah termasuk upah yang *ghaib* (tidak ada) meskipun disifati dengan uang sebagai perantaranya. Ketidaktahuan yang disertai dengan ketiadaan sifat berpengaruh pada terjadinya upah dan sifat-sifat tersebut sebagai guna penyaksian (penglihatan dengan mata), karena keghaiban (ketidaktahuan) barang yang dijual, atau karena adanya kesulitan dalam membeberkan kekhawatiran akan terjadinya kerusakan padanya. Karena itu membolehkan penjualan yang didasarkan atas keterangan sifat-sifatnya.

6. Hak Menerima Upah

Hak *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsungnya dan tidak diisyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Secara umum dalam ketentuan Al-Quran yang ada keterkaitannya dengan penentuan upah dijumpai dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 90 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ ﴾

⁵⁰Asy-Syarbashi, *Yas'Alunaka (Tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan)*, (Jakarta: Lentera, 1999), h.319.

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja maka dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan pemberi pekerjaan (majikan) untuk menjadi adil, bijaksana dan dermawan kepada pekerja disebabkan pekerja mempunyai andil yang besar untuk kesuksesan pemberi pekerja. Maka wajib pemberi pekerja untuk mensejahterakan pekerjanya, termasuk dalam hal ini member upah yang layak⁵¹

7. Sistem Ijarah Dalam Islam

a. Sistem Pengupahan (ijarah)

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka keajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak diisyaratkan pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Upah berhak diterima dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- b. Pekerjaan telah selesai, jika akadnya atas jasa maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.
- c. Mendapat manfaat, jika *ijarah* dalam bentuk barang, apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.

⁵¹ Chairumanan Pasaribu, Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* , (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 157.

- d. Mempercepat pembayaran *ijarah* sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai hal penangguhan pembayaran.

Hak menerima upah mustajir adalah sebagai berikut:

- 1) Ketika pekerjaan selesai dikerjakan
- 2) Jika penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewa berlangsung.

Ketentuan upah-mengupah ialah harus berbeda dengan objek pekerjaannya, menyewa rumah dengan bayaran rumah lainnya, atau mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan serupa, merupakan *ijarah* yang tidak memenuhi syarat. Karena hukumnya tidak sah dan mengantarkan kepada *riba*.

Menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara benar sesuai dengan manfaat yang diterimanya, menurut Syafi'i dan Ahmad sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri.⁵² Dan dijelaskan bahwa penentuan upah itu harus ditentukan terlebih dahulu sebelum *ijarah* dilaksanakan.

Mengenai sifat harga persewaan hal ini berkaitan dengan para jumhur fuqaha diantaranya ialah Imam Malik, Abu Hanifah dan Syafi'I, pada garis besarnya sependapat bahwa diantara syarat-syarat persewaan (perburuhan) hendaknya diketahui harga dan manfaatnya. Dan hal itu bisa dengan mempertimbangkan tujuannya, seperti dalam hal menjahitkan

⁵²*Ibid.*, h.210

pakaian atau pintu.⁵³ atau dengan menetapkan masanya apabila tidak ada tujuan yang tertentu, seperti memperkerjakan buruh

Jumhur fuqaha mengemukakan alasan, bahwa perburuhan itu pada dasarnya juga merupakan jual beli. Dengan demikian apa yang menghalangi jual beli karena adanya unsure ketidaktahuan terhadap tempat yang menimbulkan kerugian juga berlaku pada masalah perburuhan, Imam Malik dan syafi'I sependapat bahwa jika kedua belah pihak menetapkan masa tertentu bagi manfaat yang tidak ada tujuannya, juga menetapkan permulaan masa tersebut dan permulaan ini dimulai sesudahkan akad maka cara ini diperbolehkan .

Tetapi kedua imam ini berselisih pendapat dalam hal apabila kedua belah pihak tidak menetapkan permulaan masa tersebut atau menetapkan tetapi bukan sesudahkan akad maka Imam Malik berpendapat bahwa cara seperti itu dibolehkan, yakni jika keduanya menetapkan masanya, tetapi tidak menetapkan permulaan masa tersebut . seperti jika seseorang berkata “ Saya menyewa rumah ini dari kamu selama setahun dengan harga sekian, atau sebulan dengan harga sekian”. Tanpa menyebutkan permulaan bulan atau tahun tersebut maka Imam Syafi'I berpendapat bahwa cara seperti ini tidak dibolehkan.⁵⁴

Begitu juga penetapan sewa pada masa pemerintahan khalifah Umar ia senantiasa mengingatkan para pejabatnya untuk berlaku jujur dan adil dalam penetapan sewa atas tanah. Ketika beliau mengutus pejabat

⁵³ Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatu'l Mujtahid* , (Semarang: Asy-Syifa'1990), h .211.

⁵⁴ *Ibid.*, h 212.

pemerintahannya, Hudaifah bin Yaman dan Usman bin Hanif ke Negara yang ditaklukan Islam yaitu Iraq dan Syiria untuk menetapkan sewa atas tanah beliau berpesan kepada keduanya yaitu” *Kalian harus mempertimbangkan dengan hati-hati manakala kalian menetapkan (atau memungut sewa), jangakah mengambil lebih dari apa yang dihasilkan oleh tanah-tanah tersebut.*⁵⁵

Selain itu Imam Abu Yusuf menguraikan tentang prinsip penetapan sewa yang dijalankan oleh khalifah Umar, yaitu “*Kita tidak sewajarnya mengenakan sewa terhadap petani-petani diluar kemampuan mereka untuk membayar dan tidak seharusnya membebaskan mereka melebihi dari apa yang dapat dihasilkan oleh tanah tersebut*”.⁵⁶

Dalam peristiwa lain, Imam Abu Yusuf merujuk pada perintah khalifah Umar kepada pejabat negaranya, *menyatakan “Dan kamu seharusnya menetapkan dan memungut sewa dari para petani penggarap dengan cara yang baik, ringan dan disepakati oleh mereka*”.⁵⁷ Oleh sebab itu dalam menetapkan harga atau pemungutan sewa hendaknya mempertimbangkan asas keadilan dan kejujuran dan saling memikirkan tindakan yang sepantasnya dilakukan agar terjauhi dari hal yang tidak diinginkan berupa upah yang menjadi haram hukumnya dikarenakan unsur keterpaksaan dari salah satu pihak.

⁵⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 180.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 181.

⁵⁷ *Ibid.*, h.181

BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Toko Elektronik Rava Computer Simpur Center Bandar Lampung

1. Sejarah Toko Elektronik Rava Computer

Toko berbasis alat elektronik Rava Computer berdiri pada tahun 2016. Lokasi toko Rava Computer ini berada di Jl. Brigjend Katamso tepatnya di pusat perbelanjaan Simpur Center di lantai 3. Toko berbasis elektronik ini menyediakan berbagai macam alat elektronik untuk kebutuhan laptop/computer seperti suku cadang, dan menerima/menjual laptop second atau baru.

Saat ini toko Rava Computer menyediakan jasa servis untuk laptop/computer sesuai dengan keahlian dari teknisi toko tersebut. Pemilik dari toko Rava Computer ialah Bapak Rudi Sutopo beliau memberitahu bahwa nama toko ini bersal dari nama anaknya yaitu Rava Chairunissa. Di toko ini terdapat 5(lima) karyawan yang bekerja sesuai bidang ahlinya yaitu bidang keuangan, bidang marketing, dan teknisi service.

2. Visi Dan Misi

Adapun Visi dan misi dari toko elektronik Rava Computer adalah sebagai berikut:

a. Visi

1. Menjadikan yang terdepan dalam bidang pengadaan computer dan suku cadangnya dengan memberi nilai kepuasan terbaik bagi

pelanggan, melalui harga yang wajar, produk dan pelayanan yang berkualitas.

b. Misi

1. Mendukung terciptanya peluang bisnis sarana teknologi dan informasi khususnya computer dan suku cadangnya.
2. Mempermudah pelanggan mendapatkan suku cadang
3. Membantu pelanggan dalam mengatasi kerusakan peralatan teknologi dengan menyediakan jasa perbaikan.

3. Struktur Toko Rava Computer

a. Biodata Kepemilikan



Nama : Rudi Sutopo
 Jabatan : Pemilik Toko Rava Computer
 TTL : Bandar Lampung, 15 Maret 1978
 Alamat : Enggal

b. Biodata Karyawan

Nama : Rosdiana
 Jabatan : Bendahara
 Tempat/Tgl lahir : Bandar Lampung, 21 April 1989
 Alamat : Jl. Woltermonginsidi Teluk Betung

Nama : Eva Heriyanti
 Jabatan : Karyawati
 Tempat/Tgl Lahir : Bandar Lampung 13 Juli 1992
 Alamat : Jl. Karya Bakti No.37

Nama :Oci Nadiroh
Jabatan :Karyawati
Tempat/Tgl Lahir :Bandar Lampung, 1 Agustus 1994
Alamat :Jl.Jendral Suprpto Gg.Masjid

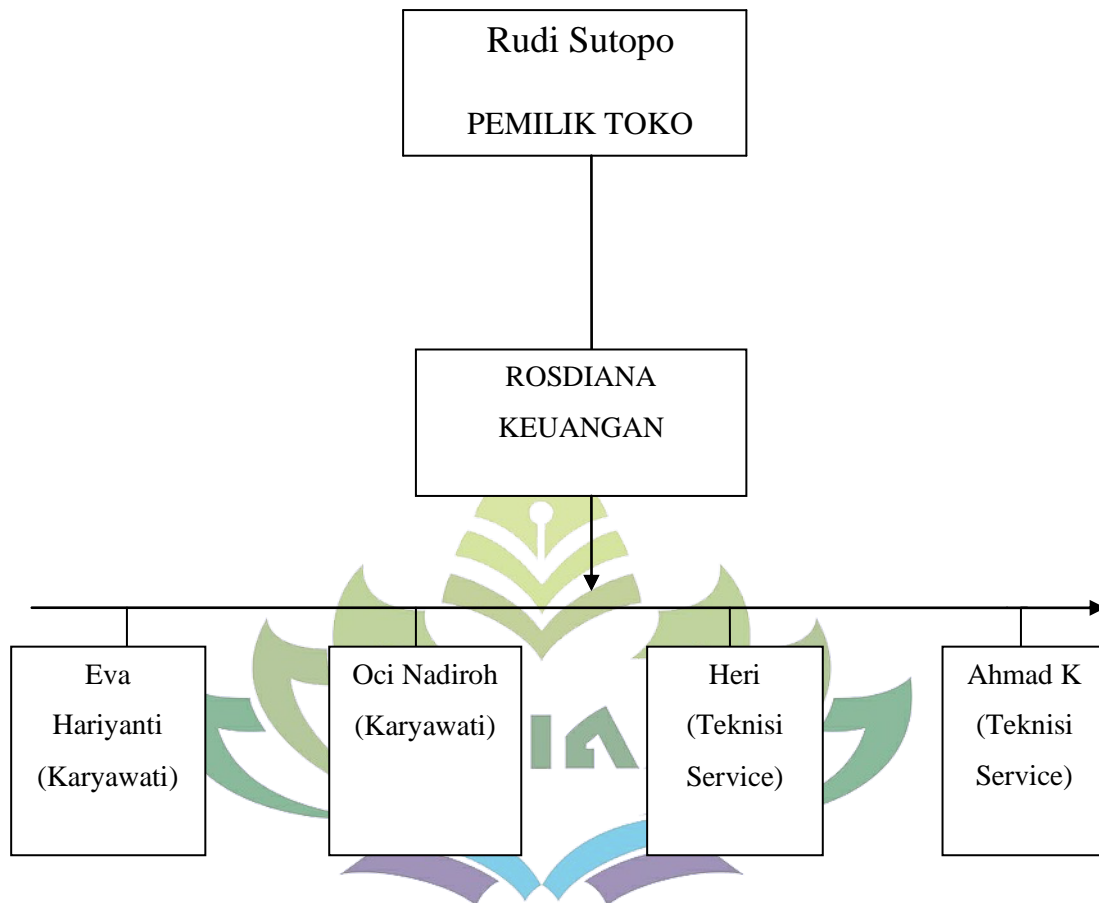
Nama :Heri
Jabatan :Teknisi Service
Tempat/Tgl Lahir :-
Alamat :Jl.Imam Bonjol (Bambu Kuning)

Nama :Ahmad Kurniawan
Jabatan :Teknisi Service
Tempat/Tgl Lahir :Kedondong, 26 Agustus 1990
Alamat : Pahoman Bandar Lampung



STRUKTUR KEPENGURUSAN

TOKO RAVA KOMPUTER



4. Pelayanan yang diberikan oleh Toko Rava Komputer kepada Konsumen

a. Jual Beli Laptop Second

Toko Rava Komputer menerima/menjual laptop second dan laptop baru dengan berbagai merek ternama harga terjangkau dan kondisi masih layak pakai dan diperbaharui seperti lainnya untuk menarik minat pembeli laptop second.

b. Jual Sparepart Laptop

Selain menerima atau menjual laptop second dan baru, toko Rava Computer menyediakan berbagai kebutuhan peralatan untuk laptop yaitu

baterai, keyboard, lcd, adaptor, printer dan tinta dan kebutuhan computer lainnya.

c. Menerima Servis

Toko Rava Komputer terdapat bagian melayani dalam servis laptop dengan harga bersahabat sesuai dengan kerusakan yang dialami sehingga membuat para konsumen merasa yakin akan kualitas yang diberikan kepada pihak toko Rava Komputer Simpur Center Bandar Lampung.

5. Pelaksanaan Upah Pekerja Teknisi Servis di Toko Rava Komputer Simpur Center Bandar Lampung

Toko Rava Komputer terletak di Jl. Brigjend Katamso Simpur Center lantai 3 Bandar Lampung, toko komputer tersebut menyediakan berbagai alat elektronik atau sparepart laptop serta menerima/menjual laptop second serta menerima jasa servis, buka setiap hari mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 19.00.

Saat ini dalam bermu'amalah setiap manusia tidak pernah lepas dari bantuan orang lain, demikian juga praktik pengupahan teknisi di toko Rava Komputer untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para pegawai di toko rava computer. Pelaksanaan upah-mengupah ada dua pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu antara pemilik toko dan pegawai toko.

Sebagai contoh konsumen ingin melihat kondisi kerusakan dan membutuhkan servis untuk memperbaiki laptop kemudian teknisi mengambil alih penanganan untuk dilakukan pengecekan terlebih dahulu guna mengetahui kerusakan laptop tersebut, setelah dilakukan pengecekan teknisi memberitahu kerusakan pada laptop dan apa saja alat yang dibutuhkan guna untuk

memperbaiki laptop yang rusak dan kisaran harga sesuai dengan alat dan tenaga keahlian yang dibutuhkan.

Jika konsumen melanjutkan untuk servis maka pembayaran akan dibayarkan pada saat servis selesai sesuai dengan harga alat dan suku cadang yang dibutuhkan, dan juga upah yang didapat para teknisi sebesar Rp 35.000-50.000 sesuai dengan kondisi kerusakan yang dialami .¹ Menurut pemilik yakni Bapak Rudi Sutopo menyatakan bahwa pemungutan biaya atas batalnya dalam kontrak pekerja adalah hal yang wajar sebab selaku pihak teknisi telah melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk mengetahui dimana letak kerusakan dari objek walaupun pekerjaan yang dilakukan dibatalkan secara sepihak.² Hal ini yang membuat prosedur ini tetap bertahan pada toko ini dikarenakan sebagai pemasukan toko, begitu juga pada layanan jasa lainnya seperti pemasangan sparepart laptop adapun biaya yang disuguhkan pihak toko sebagai upah keahlian dari jasa teknisi tersebut.

Tujuan dari mematok harga ialah untuk mengoptimalkan para pekerja dengan apa yang telah ia kerjakan dan sepadan dengan apa yang dibutuhkan, Sebagian besar toko komputer menggunakan prosedur yaitu setiap jasa teknisi dibagian servis dikenakan biaya meskipun kontrak dibatalkan, biaya tersebut disebut biaya jasa teknisi dan tidak dijelaskan sewaktu di awal persetujuan kontrak dan di diperjelas pada akhir kontrak atau pada saat kontrak di batalkan secara sepihak oleh konsumen.

¹ Ahmad Kurniawan, Teknisi Service, Rava Computer Simpur Center Bandar Lampung , Wawancara 10 Desember 2018.

² Rudi Sutopo, Pemilik Toko rava Computer Simpur Center Bandar Lampung , Wawancara pada tanggal 10 Desember 2018

6. Pendapat para konsumen tentang upah jasa pemeriksaan barang rusak elektronik pada Toko Rava Komputer

Para konsumen yang Toko Rava Komputer di Simpur Center Bandar Lampung ini mayoritas berasal dari kota Bandar Lampung, selanjutnya peneliti memaparkan hasil dari wawancara yang dilakukan mengenai praktik upah jasa pemeriksaan barang rusak elektronik di Toko Rava Komputer Simpur Center Bandar Lampung dengan jumlah wawancara yang telah diwawancarai peneliti yaitu sebanyak 5 orang konsumen toko tersebut, berikut adalah pendapat dari konsumen :

a. Muhammad Ariztama

Sebagai mahasiswa IBI Darmajaya sering berkunjung ke toko komputer termasuk Toko Rava Komputer dengan membawa laptop yang mengalami kerusakan keyboard yang tidak berfungsi akibat terkena air hujan. Pelayanan toko tersebut diyakani sangat dipercaya dikarenakan kualitas yang diberikan terbilang bagus melihat kondisi toko yang terbilang lumayan ramai, menurut ia sebenarnya sah-sah saja menarik jasa teknisi sebagai pemasukan toko tetapi dirundingkan terlebih dahulu sehingga persiapan uangnya tersedia jika ada ya tidak apa yang repot yang tidak ada persiapan.³

b. Bapak Handoko

Yaitu seorang pemilik warnet yang berkunjung pertama kali ke toko dengan membawa sebuah CPU komputer yang hendak di servis. Menurutny ia kurang menyetujui terhadap apa yang diberlakukan pihak

³ Hasil wawancara dengan Ariztama mahasiswa IBI Darmajaya, tanggal 13 Desember 2018

toko dengan membatalkan kontrak dikarenakan suatu alasan harga yang dibutuhkan sangat tidak sanggup dipenuhi, semestinya dijelaskan dahulu sebab beliau pernah servis di toko komputer lain yang tidak menggunakan peraturan seperti ini. Dan mau tidak mau membayar padahal beliau belum melakukan jasa servis.⁴

c. Risnani Febriana (sales marketing Auto 2000 Raden intan)

Menurut saudara risnani mematok harga apalagi hanya melakukan pemeriksaan semestinya tidak harus dikenakan biaya dan juga kita sebagai makhluk hidupkan punya pilihan selagi kontrak belum dijalankan, menurutnya tidak wajar dan sangat aneh apabila dikenakan biaya terlebih lagi kebutuhan memang sedang banyak.⁵

d. Evi Nurhayati (Owner Olshop) dan mahasiswa UIN Raden Intan lampung Fakultas Tarbiyah prodi bimbingan konseling.

Membawa laptop untuk di servis dengan kerusakan layar laptop retak dan engsel patah tak bisa ditutup menjelaskan pendapatnya yaitu jika saya tahu biayanya habis berapa kira-kira orang tua saya sanggup untuk itu tidak apa-apa begitu juga sebaliknya saya kurang setuju jika penentuan upahnya pada saat akhir kontrak, bukannya pihak toko sudah mengambil untung dari sparepart yang dibeli untuk diganti hal itu sudah membuat keuntungan

⁴ Hasil wawancara dengan Handoko (pemilik warnet) tanggal 17 Desember 2018.

⁵ Hasil wawancara dengan Risnani Febriana (Sales marketing Auto 200), tanggal 21 Desember 2018.

walaupun tidak banyak tetapi untuk ukuran mahasiswa itu cukup besar menurutnya.⁶

e. Nani Natalia

Seorang wiraswasta yang membawa laptop merek Asus dengan kerusakan laptop tidak mau berfungsi tetapi kondisi hidup dengan biaya ganti sparepart laptop mencapai Rp.800.000 yaitu ganti keyboard dan LCD , menurutnya ia kurang setuju, jika dikarenakan uang yang tidak disanggupi telebih lagi ada jasa teknisi harus membayar dua kali jika kontrak diteruskan itulah yang membuatnya merasa keberatan.⁷

d. Dedi Saputra

Saudara Dedi seorang wiraswasta yang sudah berkunjung ke toko Rava Komputer dengan membawa notebook yang mengalami kerusakan tombol keyboard tidak berfungsi setelah dilihat dan di cek bahwa keyboard memang harus diganti akibat sudah terlalu lama masa pemakaian, total biaya penggantian sebesar Rp.350.000. setelah setuju dengan penggantian keyboard total penggantian sampai selesai tertera di kwitansi sebesar Rp.400.000 dan pihak toko menerangkan bahwa keyboard yang dicari sesuai dengan tipe notebook yang dipakai terbilang jarang ditemui dan harus dicari, dan menganggap itu sudah sebagai biaya operasional teknisi yang bekerja. Menurutnya kurang berkenan dan diterima jika itu alasan yang diberikan sebab teknisi tidak menguraikan prosedur dari toko yang memang sudah lumrah dipakai sejak lama.

⁶ Hasil wawancara dengan evi Nurhayati (Owner Olshop dan Mahasiswa UIN Raden intan Lampung), tanggal wawancara 11 Desember 2018.

⁷Hasil wawancara dengan Nani Natalia(wiraswasta), tanggal 27 Desember 2018

Berdasarkan komentar konsumen diatas disimpulkan bahwa praktik upah jasa yang diberlakukan oleh pihak toko Rava Komputer tersebut kurang disetujui oleh sebagian konsumen, untuk hal itu dalam menentukan kebijakan sebaiknya diberitahukan dan diuraikan semata-mata untuk menambah wawasan dan pengetahuan konsumen agar tidak merasa dirugikan dan merasa ada keterpaksaan dikemudian hari dan untuk setiap pekerjaan yang dilakukan mendapat berkah serta ridha dari Allah SWT.



BAB IV

ANALISA DATA

A. Praktik Pengupahan Jasa Pemeriksaan Barang Rusak Elektronik Pada Toko Rava Komputer Simpur Center Bandar Lampung

Pada bab ini akan di analisis data yang telah diperoleh penulis dari penelitian, dimana data tersebut yang penulis dapatkan dari metode interview sebagai metode pokok guna mendapatkan suatu keputusan objektif yang dapat berfungsi sebagai fakta baru. Selain itu juga penulis menggunakan metode observasi sebagai metode penunjang guna melengkapi data yang telah penulis dapatkan melalui metode dokumentasi.

Sebelum dianalisa data yang penulis peroleh terlebih dahulu dikumpulkan sesuai dengan jenis data yang ada, sesuai data terkumpul menurut jenisnya masing-masing kemudian penulis menganalisis data dengan metode untuk memaparkan dan menafsirkan data yang telah diperoleh, setelah data yang dianalisa kemudian diambil data kesimpulan dengan demikian tidak adanya terjadinya kesalahan pada bab selanjutnya.

Kemudian, praktik yang terjadi di Toko Rva Komputer Simpur Center Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Subjek atau pelaku yang melakukan kerjasama kontrak servis di Toko Rava Komputer terdiri dari dua pihak yang melakukan. Yakni teknisi servis dan penyewa jasa servis(konsumen).
2. Dalam pelaksanaan kontrak kerjasama penyewaan jasa servis di Toko Rava Komputer ini secara keseluruhan belum memenuhi rukun dan syarat *ijarah* dikarenakan tidak adanya pemberitahuan atau belum ditentukannya

upah untuk jasa teknisi di waktu awal kontrak meskipun kontrak dibatalkan maupun dilanjutkan.

Berdasarkan hal ini, dilihat dari segi subjek atau pelaku dalam melaksanakan kegiatan penyewaan jasa servis di Toko Rava Komputer Simpur Center Bandar Lampung ini jika ditinjau dari hukum Islam belum sesuai atau bertentangan dengan konteks *ijarah* sebab tidak adanya persetujuan antara kedua pihak yang menyebabkan pihak konsumen merasa dirugikan akibat tidak transparannya kontrak kerjasama tersebut. Kemudian dari hasil wawancara yang didapat penulis lapangan seperti yang telah dipaparkan pada bab III serta merujuk pada bab II sebagai landasan teori. Bahwa upah (*ijarah*) merupakan suatu akad yang dipergunakan untuk pemilik manfaat jasa dari seorang *mu'jir* oleh seorang *musta'jir* yang jelas dan disengaja dengan cara memberikan penggantian/upah. Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud, dan konsumen pun merasa upah yang diberikan telah disetujui bersama namun harus sebanding dengan pekerjaan yang telah dikerjakannya.

Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad perjanjian kerja, karena akad menimbulkan hubungan yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Upah juga menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, setelah menganalisis data-data yang dikemukakan diatas peneliti merasa adanya kesenjangan antara teori dan praktek yang terjadi, bahwa praktik

sistem pengupahan yang ditentukan pihak Toko Rava Komputer kepada konsumen tersebut ialah kurang adanya transparansi terhadap kedua belah pihak dimana penentuan harga dalam mengambil upah dilakukan setelah terjadinya pembatalan kontrak yang seharusnya dilakukan dan diberitahukan di awal atau pada saat akad persetujuan. Pentingnya penjelasan upah pekerja sangatlah dibutuhkan agar terjaga tali silaturahmi antara penjual jasa dan pembeli jasa .

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Atas Jasa Pemeriksaan Barang Rusak Elektronik

Dalam kegiatan mu'amalah, memperhatikan kebaikan-kebaikan manusia adalah sesuatu yang mendasar dalam syariat Islam dan merupakan salah satu asas hukum Islam. Hal ini dilakukan demi kemaslahatan bagi umat manusia di muka bumi. Oleh karena itu hukum islam memberikan sebuah batasan-batasan terhadap pola perilaku manusia agar dalam setiap kegiatannya tidak menimbulkan kemadharatan baik bagi dirinya sendiri maupun pihak lain.

Rsulullah SAW pun menekankan kepada umat manusia dalam bermu'amalah selalu mengedepankan kejujuran, keadilan, serta kesejahteraan sesama umat manusia di bumi ini. Dengan demikianlah diharapkan setiap umat manusia dapat mengambil manfaat antara satu dengan yang lainnya sesuai jalan yang benar pada norma-norma agama tanpa kecurangan dan kebatilan semata yang membuat para pihak merasa tidak adil dalam sebuah transaksi apapun,

Menurut objek hukum Islam yang ada kontrak kerjasama yang dilakukan dikategorikan dalam akad *al-ijarah ala-a'mal* yaitu dengan cara

memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas, *Mustajir* adalah orang yang mempunyai keahlian sesuai dengan bidangnya, tenaga jasa dan lain-lainnya, kemudian *mu'ajir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga jasa dengan imbalan yang telah ditentukan, *musta'jir* mendapat upah atas tenaga yang dikeluarkan untuk *mu'ajir* mendapatkan tenaga dan jasa dari *musta'jir*.

Seperti dalam fiqih mu'amalah, upah atau *ijarah* dapat diketahui menjadi dua yaitu upah yang telah disebutkan (*ujrah musammah*) dan upah yang sepadan (*ujrah al-misli*), upah yang disebutkan harus disertai dengan adanya kerelaan/keridhaan kedua belah pihak yang sedang melakukan kontrak kerjasama atau transaksi terhadap upah tersebut. Dengan itu pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa membayar jika tidak ada persetujuan antara kedua pihak sewaktu awal kontrak. Dan apabila upah tersebut disebutkan saat melakukan transaksi, maka upah tersebut disebutkan (*ajrun musammah*) dan apabila upah tidak disebutkan ataupun terjadinya perselisihan terhadap kontrak tersebut maka kontrak yang dilakukan tidak sah.

Sedangkan upah yang sepadan (*ujrah al-misli*) adalah upah yang sepadan dengan apa yang dikerjakan serta sepadan dengan apa yang telah dilakukan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disetujui oleh kedua pihak. Oleh karena itu dengan menjadi sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat adapun para pihak yang

berakad dalam sistem upah kerja ini adalah pihak yang membentuk akad yaitu pemilik usaha dengan karyawan dan konsumen yang membutuhkan jasa.

Sebelum terbentuknya akad sangat penting didahulukan menentukan upah yang sepadan antara kedua pihak dan diketahui secara bersamaan disertai kerelaan dan keridhaan dengan dasar kerjasama. Selain itu juga dengan sistem ini juga sistem pengupahan yang dilakukan oleh pihak Toko Rava Komputer adalah hal yang benar dan semestinya dilakukan dan menjadi suatu kebiasaan setempat dan kebiasaan tersebut bisa menjadi akibat hukum.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa sebagian *musta'jir*, mereka mengatakan bahwa sistem pengupahan ini sudah terbiasa dilakukan sebab keahlian mereka hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu tidak semua orang mempunyai keahlian dalam bidang teknologi seperti ini.

Seorang pekerja berhak menerima upah jika upah yang ditentukan dan disetujui oleh kedua pihak karena disitulah terdapat kerelaan atau keridhaan seseorang terhadap haknya oleh sebab itu umat Islam terikat dengan syarat-syarat antara mereka kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dalam menentukan akad yang sesuai dengan syari'ah adalah yang tidak mengandung *gharar* (ketidakpastian, kejelasan, penipuan) .

Melalui akad kita bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Begitu juga laki-laki dan perempuan yang disatukan dalam menjalani kehidupan dengan akad. Dengan adanya akad dapat memfasilitasi seseorang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya

yang tidak dapat dipenuhi tanpa bantuan dan jasa orang lain. Dapat dibenarkan bahwa akad yaitu sarana sosial yang ada dan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dengan makhluk sosial lainnya yang ada di bumi ini. Teori ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya akad (perjanjian) yang sangat melekat pada kehidupan sosial, yang menjadikan sarana dalam memenuhi berbagai bentuk dalam kepentingan kita.

Penegasan upah dalam kontrak upah dalam kontrak adalah sesuatu yang berhak diketahui melakukan pekerjaan, hal ini mencegah terjadinya perselisihan tentang pekerjaan dan upah dikemudian hari sehingga tidak ada pihak yang merasa keberatan dan merasa kecewa dengan kebijakan yang dilakukan pihak *musta'jir*. upah merupakan balasan atau imbalan yang menjadi hak bagi pekerja karena telah melakukan suatu pekerjaannya. Al-Qur'an maupun As-sunnah telah memberikan perintah kepada manusia untuk bekerja atau berusaha semaksimal mungkin sehingga mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Baik dalam tataran ibadah atau mu'amalah. Akan tetapi baik dalam al-Qur'an maupun As-sunnah tidak menjelaskan dan mengatur penetapan upah secara detail, karena upah termasuk dalam bidang mu'amalah yang senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan masyarakatnya. Akan tetapi yang terpenting adalah antara *mu'ajir* dan *musta'jir* telah saling ikhlas dan ridha dalam memberikan dan menerima upah dan tidak ada paksaan diantara kedua pihak yang melakukan kontrak transaksi.

Pembayaran upah yang terjadi di Toko Rava Komputer merupakan suatu kebijakan yang ditetapkan yang sudah menjadi hal biasa atau lumrah secara terus menerus sehingga dalam prakteknya salah satu pihak tidak mengetahui upah yang akan dikenakan. Dalam hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, pemberian upah pemeriksaan barang rusak ini yang diberlakukan pihak toko adalah akad yang tidak sah karena bertentangan dengan hukum Islam yang menyebabkan adanya *riba* dan *gharar*. Begitu pula dengan pendapat konsumen yang sebagian menganggap hal ini memang sudah lumrah dikalangan teknologi tetapi alangkah baiknya jika penarikan upah diberitahukan pada saat awal kontrak sebab konsumen merasa haknya dipergunakan dan merasa tidak adanya keterpaksaan yang dialami oleh konsumen.

Standar upah yang layak bagi undang-undang adalah terpenuhinya kebutuhan pokok buruh agar dapat menikmati hidup dengan layak maka disebut aturan tentang batasan minimal bagi pembayaran upah, sehingga komponen hidup dengan layak ditetapkan pemerintah ditebus. Sedangkan dalam hukum Islam secara praktis tidak menyebutkan sistem dan besaran upah yang layak untuk diberikan, tetapi Islam member gambaran umum yang penting bagaimana tata cara dalam pembayaran upah kepada yang berhak. Islam lebih mengedepankan konsep moral, adil layak disertai kerelaan atau keridhaan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tanpa adanya paksaan.

Dalam transaksi mu'amalah terdapat ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi kerjasama maupun transaksi perijinan jual beli. Dengan demikian secara kontekstual, sewa-menyewa atau upah mengupah jasa yang dibahas dalam hal ini ditemukannya suatu kejanggalaan dikarenakan upah dari jasa tersebut tidak ditentukan pada saat melakukan akad sehingga konsumen merasa tidak adanya

Berdasarkan semua penjelasan di atas, maka peneliti dapat mengambil suatu kesimpulan, bahwa praktik mu'amalah khususnya sewa-menyewa atau upah mengupah (*ijarah*) adalah jalan dimana untuk memenuhi standar kehidupan atau kebutuhan manusia sehari-hari dalam menjalani kehidupan. Dalam hal ini upah-mengupah jasa pemeriksaan barang rusak elektronik dengan menyewa seorang jasa teknisi belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan menurut aturan syara'. Namun masih banyak masyarakat yang kurang faham dan kurangnya pengetahuan serta kurangnya kepedulian terhadap prosedur yang diterapkan oleh pihak toko dikarenakan hal itu sudah menjadi hal pada umumnya dikarenakan sudah menjadi ketentuan pada setiap toko dengan mempertimbangkan permintaan dan penawaran saat ini.

Terkait dengan hal itu selaku umat muslim yang taat akan peraturan Allah SWT dan Rasul-Nya berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis-Nya yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya, yang mewajibkan kepada seluruh umat manusia untuk patuh kepada penguasa dan hikmah tersimpan dalam perintah untuk taat kepada penguasa adalah untuk memelihara kesatuan, dan persatuan karena perpecahan dan perselisihan menyebabkan kerusakan

diantara umat manusia dikarenakan Islam tidak mengajarkan umatnya agar mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan berusaha sebaik-baiknya, tetapi perlu diingat usaha yang dianjurkan adalah yang sesuai dengan aturan agama Islam. Oleh karena itu apabila pekerjaan yang dilakukan bertentangan dengan aturan agama Islam bagaimana dengan upah yang diterima karena telah mengerjakan pekerjaan yang telah dilarang dalam islam.

Agar tetap terjaga tali silaturahmi dan menjauhkan dari dasar dzolim antar umat manusia hendaknya melakukan hal yang pantas dengan menimbang rasa keadilan, kejujuran antar sesama makhluk sosial agar saling terjaga kesejahteraan dan ketentraman di manapun berada.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang peneliti lakukan, selanjutnya dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Atas Praktik Jasa Pengecekan Barang Rusak Elektronik Tanpa Akad diawal yang terjadi di Toko Rava Komputer Simpur Center Bandar Lampung sebagai berikut:

1. Pelaksanaan praktik pemberian upah pada jasa pengecekan barang rusak elektronik yang terjadi di Toko Rava Komputer Simpur Center Bandar Lampung adalah bentuk pengupahan yang tidak disebutkan pada awal perjanjian atau kontrak, dengan melakukan sewa jasa servis. Sebelum dilakukan jasa servis terlebih dahulu dilakukan pengecekan kondisi barang elektronik setelah dilakukan pengecekan pihak toko memberitahu kendala kerusakan yang dialami dengan harga barang yang ingin diganti, dan jika pihak penyewa jasa merasa kurang berkenan, maka ia berhak membatalkan kerjasama tersebut dikarenakan belum dilakukan kegiatan servis hal ini yang membuat pihak toko mengeluarkan kebijakan adanya upah dari jasa pengecekan barang karna sudah dilakukan pada tahap awal.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap akad pemberian upah yang terjadi di Toko Rava Komputer yang melibatkan teknisi toko dan konsumen adalah adanya unsur penetapan harga sepihak dan tidak adanya transparansi antara kedua pihak yang dilakukan oleh teknisi toko kepada konsumen ,

oleh karena itu salah satu pihak mengalami kerugian karna menguntungkan salah satu pihak hal ini sama saja disebut *riba* dan adanya *gharar* yang mengambil biaya tambahan tanpa adanya persetujuan penjelasan pada saat awal kontrak dari pihak *mu'jir* dan *musta'jir*. Adanya *riba* dalam kontrak perjanjian upah mengupah ini sangat dilarang dan haram hukumnya karena hal ini tidak sesuai dengan prinsip *ijarah* yang harus mengedepankan prinsip keadilan, kejujuran, dan mengedepankan asas kehidupan agar tercapai suatu faedah dalam transaksi tersebut. Dan Islam mengajarkan kita bahwa orientasi usaha tidak hanya mencari keuntungan semata, tetapi dalam pelaksanaannya juga mengharapkan ridha Allah SWT.

B. Saran-saran

1. Kepada para pengusaha dalam berbagai bidang khususnya dalam bidang elektronik dan penyedia jasa service alat elektronik hendaknya lebih memahami dan mengerti segala sesuatu hal yang berkaitan dengan kerjasama yang dilakukan pihak toko (teknisi servis) dengan para konsumen
2. Perlu ditinjau ulang dalam melakukan akad antara kedua pihak agar sama-sama mengetahui sifat, kadar, dan harga yang diberikan oleh pelaku pemberi jasa kepada penerima jasa agar pemberian upah tidak mengandung unsur *riba* dan *gharar* yang sangat dilarang dalam ketentuan hukum Islam.

3. Penelitian dan penyusunan karya tulis ini masih jauh dari harapan sempurna serta masih banyak kekurangan, baik yang bersifat teknis maupun non teknis oleh sebab itu masukan, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan karya tulis ini di masa yang akan datang, dan penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi pencari ilmu masa depan dan tetap semangat menjalani proses setiap kesulitan yang di alami.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mujieb M, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, Cetakan Ke III, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002

Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Anwar Desy, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* Surabaya: Amelia, 2005.

A mas'adi Ghufuran, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2002.

Al-adalah Vol. XII. No.04 4 Desember 2015), h.786. (On-line) tersedia di : <http://ejournal.radenintan.ac.id/mdec/php/adalah/article.view>. (29 Desember 2018, pukul 22:10 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Ali Hasan M, *Berbagai Macam Tranksaksi Dalam islam (fiqh muamalat)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.

Az-Zarqa' Ahmad Mustafa, *al-Fiqh al-Islami fi Tsaubihi al-Jadid: al-Madkhal al-Fiqhi al-'Amm*, jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1968.

Ali Hasan M, *Berbagai Macam Tranksaksi Dalam islam (fiqh muamalat)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.

Aziz Muhammad abdul Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010.

Dewi Gemala *et al*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Diterbitkan atas kerja sama dengan Badan Penelitian Fakultas Hukum UI dengan Prenada Media, 2005.

Haroen Nasroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Grafindo Persada Pertama, 2007.

Ibnu Hajar Al-Hafidh Asqalany, Terjemahan Bulughul Maram, PT. Alma'arif 1961

Ja'far Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, PERMATANET Publishing, 2016.

Karim Helmi , *Fiqh Mu'amalah* Jakarta : Rajawali Pers , 1997.

Kartono kartini, *Pengantar metodologi Riset Sosia*, Cetakan VII Bandung: Mandar Maju, 1996.

Muhammad Abdukadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004..

M.I Yusato dan MK Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* , Jakarta : Gema Insani Press, 2002..

Mujueb Abdul, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta : Kalam Mulia, 2001.

Mustofa Al-Maragi Ahmad, *Tafsir Al-Maragi* , Cet I Semarang: Toha Putra , 1984.

Nainul Authar (Himpunan Hadis-Hadis Hukum) jilid 4, Surabaya: Pt.Bina Ilmu

Pasaribu Chairumanan, K.Lubis Suharwardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* , Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Qardhawi Yusuf , *Halal Haram Dalam Islam* , Solo : Era Intermedia, 2000.

Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II* Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam* jilid IV, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 2003.

Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Rusyd Ibnu , *Terjemahan Bidayatul Mujtahid* , Semarang : Asy-Syifa, 1990.

Shiddieqy Ash Hasbi,,*Hukum-Hukum Fiqh Islam, (Tinjauan Antar Madzhab)*, Semarang :Pustaka Riski Putra, 2001

Sholeh Ahmad , *Terjemah dan Penjelasan Kitab* Jilid II, Semarang : Usaha Keluarga , 1985..

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* , Cet ke-9 Jakarta : Rajawali Pers, 2014.

Sudjana Nana, *Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta , 2001.

Sutrisno Hadi, *Metode Research* , Jilid I Yogyakarta : Yayasan Penerbit , Fakultas Psikologi UGM, 1981.

Syarbashi-asy, *Yas'Alunaka (Tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan)*, Jakarta: Lentera, 1999.

Syarifuddin Amir, , *Ushul Fiqh*, Cet.I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Syafe'i Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.

Taqiyuddin Imam AbuBakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar Fii HalliGhayatil Ikhtishar*, Surabaya: Bina Iman.

Tim Tasbih Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta: Versia Yogya Grafika, 1995.

Wahab Khalaf Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh, Terjemahan*, Jakarta : Amzah , 1992

